

BAB III

REFERENDUM YUNANI SEBAGAI LANGKAH POLITIK ALEXIS

TSIPRAS

Kondisi perekonomian Yunani yang tidak stabil akibat jumlah hutang luar negeri yang terlampaui tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi setiap Perdana Menteri yang menjabat pada masa krisis. Tidak terkecuali Perdana Menteri Yunani saat ini yaitu Alexis Tsipras yang telah menjabat sejak awal tahun 2015. Langkah-langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Yunani sejak krisis 2009 selalu mengerucut pada permasalahan hutang luar negeri dan pencairan dana talangan yang digagas oleh Uni Eropa. Meski demikian, dinamika yang terjadi pada saat masa jabatan PM Alexis Tsipras merupakan yang paling fluktuatif dan tidak terjadi di masa pemerintah-pemerintah sebelumnya.

Semasa pemerintahan PM Alexis Tsipras, Yunani terkesan lebih berani menghadapi tekanan-tekanan yang datang dari pihak Uni Eropa. Hal tersebut merupakan cerminan dari sikap PM Alexis Tsipras yang condong radikal dalam hal politik. Namun bukan berarti hal tersebut merupakan sebuah poin negatif bagi Yunani. Yunani pada dasarnya membutuhkan sebuah kepemimpinan yang tegas dan mampu menghadapi tekanan Uni Eropa dengan keras dan tidak mudah untuk dikendalikan melalui proposal-proposal syarat dana talangan yang diajukan oleh Uni Eropa.

Puncak dari perlawanan Yunani yang dipimpin oleh Alexis Tsipras adalah pada saat Tsipras menggelar referendum untuk menentukan apakah Yunani akan

menerima persyaratan bailout ketiga dari Uni Eropa atau tidak. Referendum tersebut diadakan pada 5 Juli 2015 dengan hasil “Tidak”. Namun demikian, tidak lama kemudian pemerintah Yunani justru menyetujui syarat-syarat dana talangan yang diajukan oleh Uni Eropa. Artinya, ada sebuah kondisi yang membuat Yunani mutlak harus menerima dana talangan tersebut, yang menunjukkan bahwa akan lebih menguntungkan bagi Yunani untuk menerima dana tersebut dan referendum Yunani dipastikan memiliki tujuan tersendiri yang berperan di dalam negosiasi syarat dana talangan dari Uni Eropa.

A. Masa Kepemimpinan Alexis Tsipras

Alexis Tsipras mencatat rekor sebagai perdana menteri termuda yang pernah diimiliki Yunani semenjak 1865, dirinya berusia 40 tahun pada saat menjabat menjadi Perdana Menteri pada Januari 2015 lalu. Belum tepat sebulan setelah dirinya menjabat menjadi Perdana Menteri, Alexis Tsipras menggebrak dunia internasional melalui pidatonya yang terkesan menantang Uni Eropa. Perdana Menteri Alexis Tsipras mengklaim bahwa tekanan-tekanan berupa tuntutan implementasi kebijakan penghematan yang selama ini datang dari pihak Uni Eropa merupakan sebuah krisis humanitarian dimana kebijakan-kebijakan yang dipaksakan kepada Yunani tersebut telah menyengsarakan rakyat Yunani. Klaim Perdana Menteri Alexis Tsipras tersebut bukanlah klaim yang tidak berdasar, pasalnya, akibat dari diimplementasikannya kebijakan demi kebijakan penghematan selama lima tahun terakhir telah meningkatkan angka pengangguran Yunani hingga mencapai 25%.¹

¹ Kabar Bisnis 24, Alexis Tsipras Tantang Uni Eropa dan IMF (online)
<http://kabar24.bisnis.com/read/20150209/19/400317/presiden-yunani-alexis-tsipras-tantang-uni-eropa-dan-imf> diakses pada 30 September 2016

Dalam pidato perdananya sebagai Perdana Menteri tersebut, Alexis Tsipras juga menyatakan bahwa bantuan luar negeri telah gagal. Perdana Menteri Alexis Tsipras mendeklarasikan bahwa selama menjabat sebagai Perdana Menteri, dirinya tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dan menolak bantuan dana dari luar apabila diikuti dengan syarat penghematan.

Pidato kontroversial tersebut, meskipun mendapatkan dukungan dari golongan sayap kiri dan non-konservatif dari dalam birokrasi Yunani, akan tetapi juga mengundang maut bagi keberlangsungan perekonomian Yunani dan statusnya sebagai negara anggota Eurozone. Pasalnya, pidato tersebut telah memicu kemarahan Perdana Menteri Jerman, Angela Merkel. Merkel mengatakan bahwa Jerman tidak akan mengupayakan kembali dana talangan untuk Yunani. Perlu diketahui bahwa kurang lebih 30% dari seluruh dana talangan yang diterima Yunani selama ini merupakan sumbangan dari Jerman. Selain itu, Jerman yang merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh dalam birokrasi Uni Eropa mengeluarkan ancaman kepada Yunani untuk keluar dari Eurozone meskipun banyak ditentang oleh kepala negara yang lain.²

Pada awalnya, ancaman tersebut tidak terlalu digubris oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras karena dirinya memang telah berdedikasi untuk mencari jalan lain dalam upaya menyelamatkan perekonomian Yunani. Berbagai cara dilakukan untuk mencari kreditor lain yang mau memberikan bantuan dana tanpa syarat yang memberatkan rakyat Yunani. Perdana Menteri Alexis Tsipras mulai mendekati OECD untuk bekerja sama menangani krisis ekonomi Yunani, namun langkah

² Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015 <http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

tersebut mengalami kebuntuan ketika OECD justru memihak persyaratan yang sama seperti troika. Alexis Tsipras mulai terlihat kewalahan ketika dirinya mengubah arah politik luar negerinya menuju negara-negara komunis seperti Russia dan China, meskipun tidak juga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Pada bulan April 2015, waktu yang dimiliki Yunani sebelum hutangnya kepada IMF jatuh tempo hanya tersisa dalam hitungan bulan saja. Ditengah kesulitan yang sedang memuncak, tiga perusahaan pemeringkat kredit yaitu Standart & Poor's, Moody's, dan Fitch atau yang lebih dikenal dengan julukan "the big three" menurunkan peringkat kredit Yunani ke zona sampah. Selain itu, troika yang terdiri dari Komisi Eropa, ECB, dan IMF, menyatakan penghentian bantuan dana untuk Yunani. Nasib Yunani kini berada diambang batas.³

Perdana Menteri Alexis Tsipras pada akhirnya mengambil langkah yang berbalik 180 derajat dari janji di masa kampanye dan pidato perdananya pada saat terpilih menjadi Perdana Menteri. Alexis Tsipras juga menyatakan akan memecat pegawai birokrasi yang menentang persyaratan kreditur. Tsipras kini mulai mengimplementasikan beberapa kebijakan penghematan, salah satunya adalah reformasi usia pensiun. Tsipras menaikkan batas usia pensiun menjadi 67 tahun. Namun dirinya menyatakan bahwa langkah-langkah yang diterapkannya adalah inisiatif dari pemerintahannya dalam upaya menangani krisis dan menghindari defisit, bukan karena Yunani mematuhi persyaratan *bailout* dari troika. Dirinya juga kembali

³ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015 <http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 23% setelah oleh pemerintahan sebelumnya diturunkan menjadi 13%.⁴

Memasuki bulan Juni 2015, hutang Yunani terhadap IMF telah jatuh tempo, sementara pada saat itu Yunani tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Proses politik dan pemerintahan yang lambat serta arah politik luar negeri Perdana Menteri Alexis Tsipras yang tidak menentu menjadi salah satu penyebab bantuan dana tidak dapat dicairkan dengan cepat. Menanggapi keadaan tersebut, PM Alexis Tsipras kini mulai mengejar dana talangan, namun dirinya masih tetap bersandar pada prinsipnya untuk melakukan negosiasi ulang persyaratan kreditur bersama troika.

Perdana Menteri Alexis Tsipras memutuskan untuk mengadakan referendum pada 5 Juli 2015.⁵ Isi referendum tersebut adalah untuk menentukan apakah sebaiknya Yunani menerima persyaratan *bailout* dari kalangan kreditur atau tidak. Perdana Menteri Alexis Tsipras secara pribadi mendorong rakyatnya untuk memilih “tidak” dalam referendum yang akan diadakan tersebut. Dirinya berusaha meyakinkan troika untuk menghapus 30% hutang yang dimiliki oleh Yunani dalam upaya untuk menegosiasi ulang persyaratan dana talangan tersebut.⁶ Sedangkan dari pihak Uni Eropa, para pejabat tinggi Uni Eropa menyatakan bahwa apabila hasil referendum adalah “tidak” maka kemungkinan besar mereka akan mendorong Yunani untuk keluar dari Eurozone atau bahkan Uni Eropa.

⁴ CNN Indonesia, PM Yunani Alexis Tsipras Ungkap Identitas Radikal Dirinya (online) <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150723022900-134-67676/pm-yunani-alexis-tsipras-ungkap-identitas-radikal-di-dirinya/> diakses pada 30 September 2016

⁵ Vibiz News, Kronologi Krisis Yunani tahun 2009-2015 <http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/> diakses pada 30 September 2016

⁶ Yahoo News, Greece PM Urges NO Vote (online) <https://uk.news.yahoo.com/greece-pm-urges-no-vote-live-dignity-europe-182709597.html#BePrDru> diakses pada 30 September 2016

Meskipun telah diberikan ancaman dari Uni Eropa, namun pada kenyataannya referendum berjalan sesuai dengan keinginan Perdana Menteri Alexis Tsipras. Hasil dari referendum tersebut adalah 61% pemungut suara menjawab “tidak”. Imbas dari hasil referendum tersebut berdampak kepada pasar valas dimana nilai mata uang Euro menurun 0,8% terhadap 16 mata uang asing utama.⁷ Sehari setelahnya, Menteri Keuangan Yunani, Yaris Varoufakis, yang dilantik bersamaan dengan Perdana Menteri Alexis Tsipras dalam pemerintahan barunya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dalam blog pribadinya. Ia mengatakan bahwa alasan dibalik kemunduran dirinya adalah banyaknya tekanan dari pejabat-pejabat keuangan Uni Eropa.⁸

Menyusul hasil referendum tersebut, PM Alexis Tsipras mulai melakukan negosiasi persyaratan dana talangan dengan menyiapkan proposal untuk diserahkan kepada kalangan kreditur yaitu troika. Selama masa negosiasi, pemerintah Yunani menutup beberapa bank nasional Yunani dan membatasi jumlah uang yang dapat diambil dari mesin ATM menjadi €60 per hari. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kas perbankan yang makin mendekati titik minimal.⁹ Persyaratan yang diajukan oleh troika tetap mengarah kepada paket-paket penghematan anggaran seperti reformasi pajak, upah pegawai, dana pensiun, dan sejenisnya.

⁷ Vibiz News, “Hasil Referendum Yunani Menentang, Pasar Dunia Bergejolak” (online) <http://vibiznews.com/2015/07/06/61-hasil-referendum-yunani-menentang-pasar-dunia-bergejolak/> diakses pada 30 September 2016

⁸ Vibiz News, “Menteri Keuangan Yunani Mengundurkan Diri, Pasar Forex Semakin Jelas” (online) <http://vibiznews.com/2015/07/06/menteri-keuangan-yunani-mengundurkan-diri-pasar-forex-semakin-jelas/> diakses pada 30 September 2016

⁹ CNN, “Greece Shuts Banks in Bid to Prevent Collapse (Online)” <http://money.cnn.com/2015/06/28/news/economy/greece-banks-ecb/> diakses pada 30 September 2016

Pada 16 Juli 2015, parlemen Yunani akhirnya menyetujui persyaratan dana talangan dari troika.¹⁰ Setelah diberikan 72 jam waktu tambahan bagi Yunani untuk merevisi proposalnya oleh Uni Eropa, akhirnya *bailout* pun disepakati oleh pihak Uni Eropa. Uni Eropa juga menekankan kepada negara-negara anggota yang lain untuk mempertimbangkan wacana penghapusan hutang Yunani, khususnya kepada Jerman yang selama ini kerap menentang wacana tersebut dikarenakan Jerman merupakan negara penyumbang dana terbanyak dalam semua paket bantuan dana Yunani. Terhitung sejak 2009, dana yang telah diberikan Jerman telah mencapai angka €57 milyar.¹¹ Total dana talangan sebesar €87 milyar akhirnya disetujui oleh pihak Yunani dan troika. ECB juga memberikan dana tambahan untuk bank-bank sentral Yunani yang sedang berada diambang kebangkrutan. Yunani pun berhasil mencetak surplus dari hasil defisit selama tujuh bulan berturut-turut.

B. Menaikkan Bargaining Position Yunani Dihadapan Uni Eropa

Uni Eropa dengan jati dirinya sebagai sebuah organisasi dunia yang membanggakan integrasi regional dan ekonomi diklaim sebagai salah satu organisasi internasional terbesar dengan perekonomian terkuat di dunia. Namun bukan berarti Uni Eropa tidak memiliki celah yang dapat retak sewaktu-waktu. Dari luar, Uni Eropa bisa saja terlihat kokoh namun lain cerita apabila krisis yang terjadi di Uni Eropa justru muncul dari dalam Uni Eropa itu sendiri. Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, menyadari hal tersebut sehingga dirinya memiliki keberanian untuk

¹⁰ Vibiz News, “Parlemen Yunani Mneyetujui Paket Penghematan” (Online) <http://vibiznews.com/2015/07/16/parlemen-yunani-menyetujui-paket-penghematan/> diakses pada 30 September 2016

¹¹ BBC News (Online) <http://www.bbc.com/news/world-europe-33305019> diakses pada 30 September 2016

“melawan” Uni Eropa dengan posisinya sebagai Perdana Menteri sebuah negara yang tergabung di dalam Uni Eropa.

Sejak awal masa krisis, pihak luar yang terus memberi tekanan kepada Yunani adalah Uni Eropa. Hal tersebut dilakukan dengan cara menekan pemerintah Yunani untuk menerapkan kebijakan-kebijakan penghematan anggaran belanja dalam negeri Yunani dengan imbalan dana bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa dimana pada dasarnya dana bantuan tersebut merupakan penambahan hutang luar negeri bagi Yunani. Kebijakan penghematan yang terus dilakukan oleh pemerintah Yunani atas desakan Uni Eropa mayoritas terfokus pada upah pegawai negeri dan dana pensiun, serta pemotongan jumlah pegawai di berbagai sektor lapangan kerja.¹² Hal tersebut tentunya memiliki efek tersendiri bagi Yunani seperti meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta berkurangnya investasi asing yang menyebabkan lapangan kerja di Yunani menjadi sangat terbatas.

Dalam menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Alexis Tsipras berkeyakinan bahwa Yunani perlu menghentikan penghematan anggaran besar-besaran agar tidak menimbulkan permasalahan lain ditengah krisis yang sedang terjadi di negeri para dewa tersebut. Hingga puncaknya adalah referendum yang digelar oleh Tsipras pada 5 Juli 2015 lalu, referendum tersebut diadakan dengan alasan bahwa persyaratan bailout dari Uni Eropa terlalu memberatkan langkah Yunani. Di saat genting seperti itu, pihak Uni Eropa justru melakukan blunder dengan mengancam Yunani bahwa hasil “tidak” pada referendum tersebut dapat berakibat Yunani keluar dari Eurozone dan Uni Eropa.

¹² Foreign Policy, The Greek Depression (online)
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/01/09/the_greek_depression diakses pada 8 November 2016

Perdana Menteri Alexis Tsipras menyadari bahwa Uni Eropa melakukan kesalahan dengan ultimatum tersebut dan memutuskan untuk menghimbau rakyat Yunani untuk memilih “tidak” pada referendum yang akan diadakan. Pada akhirnya, referendum tersebut menjadi bumerang bagi Uni Eropa. PM Alexis Tsipras menunjukkan bahwa satu langkah perlawanan kecil dari satu negara anggota Uni Eropa dapat mengguncang Uni Eropa dengan efek yang besar.

Yunani tentu tidak memiliki keinginan untuk keluar dari Uni Eropa karena hal tersebut adalah sebuah langkah bunuh diri bagi Yunani, namun melalui referendum tersebut Yunani ingin menunjukkan bahwa pemerintah Yunani masih memiliki kedaulatan yang kuat atas negaranya sendiri dan tidak tunduk begitu saja terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa. Jawaban “tidak” pada referendum Yunani bertujuan untuk menaikkan *bargaining position* Yunani dalam perundingan persyaratan dana talangan antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa.

Kekuatan negosiasi Yunani dalam perundingan dana talangan dengan Uni Eropa dapat meningkat karena PM Alexis Tsipras telah mengancam kredibilitas integrasi regional Uni Eropa melalui referendum tersebut. Apabila satu negara keluar dari keanggotaan Uni Eropa, maka kredibilitas Uni Eropa sebagai organisasi yang membanggakan integritas regional dan ekonominya tersebut akan dipertanyakan. Negara-negara lain di Uni Eropa akan meragukan kemampuan Uni Eropa dalam menanggapi krisis yang terjadi di salah satu negara anggotanya. Dan bukan tidak mungkin situasi yang sama akan terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa yang lain sebagai hasil dari *butterfly effect*.

Dampak ekonomi bagi Uni Eropa juga menjadi salah satu hal yang mendasari keputusan Alexis Tsipras untuk menghimbau rakyat Yunani agar memilih jawaban “tidak” di referendum yang diadakan pada 5 Juli 2015 tersebut. Integrasi ekonomi Uni Eropa dapat dianalogikan seperti sebuah rantai kendaraan karena adanya keterikatan yang menimbulkan ketergantungan yang tinggi antara negara-negara anggota Uni Eropa, apabila salah satu mata rantai terlepas maka kendaraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Artinya, perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan dapat terganggu apabila perekonomian salah satu negara anggotanya tidak berjalan dengan baik, dengan kata lain, aksi atau kebijakan ekonomi satu negara dapat menimbulkan efek domino yang berimbas ke negara lain dan pada akhirnya akan mengganggu perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan.

Analisa tersebut terbukti ketika hasil referendum Yunani adalah “tidak” dengan jumlah pemilih sebesar 61%, nilai mata uang Euro melemah terhadap 16 mata uang asing termasuk Dollar AS dan Poundsterling. Selain dalam hal valas, nilai pasar saham Uni Eropa pun menjadi fluktuatif. Hal tersebut adalah serangan secara tidak langsung kepada Uni Eropa oleh pemerintah Yunani yang dipimpin oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras. Integrasi ekonomi yang dibanggakan oleh Uni Eropa layaknya sebuah pedang bermata dua yang kemudian digunakan oleh Yunani untuk menyerang Uni Eropa itu sendiri. Dari kondisi tersebut, sangat memungkinkan akan terjadi dampak yang jauh lebih besar apabila Yunani keluar dari Uni Eropa akibat ketidakmampuan Uni Eropa dalam menangani krisis ekonomi yang terjadi di Yunani.

Selain pada segi identitas dan ekonomi Uni Eropa, keluarnya Yunani dari Uni Eropa dapat menimbulkan permasalahan tersendiri di sektor keamanan Uni Eropa. Militer Yunani memiliki peran yang besar di dalam NATO dan secara geopolitik

merupakan wilayah yang penting bagi Uni Eropa. Yunani berada di lokasi yang penting bagi Uni Eropa, secara geografis, Yunani terletak di persimpangan antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Poin yang membuat Yunani menjadi sangat penting adalah bentuk wilayah kepulauan di bagian selatan Yunani yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Hal tersebut membuat Yunani memiliki peran penting dalam hal penjagaan perbatasan terluar Uni Eropa dari ancaman-ancaman eksternal seperti ancaman militer dan khususnya imigran, mengingat Yunani yang merupakan salah satu pintu utama bagi para imigran yang menuju Uni Eropa melalui Laut Mediterania.

Secara geografis, Yunani juga memiliki poin penting bagi NATO. Kepulauan Yunani di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania merupakan basis pertahanan militer terluar Uni Eropa. Khususnya di pulau Souda Bay, dimana NATO memiliki beberapa instalasi militer di dalamnya seperti NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre yang merupakan pusat pelatihan maritim bagi tentara-tentara NATO dan NATO Missile Firing Installation (NAMFI) yang merupakan basis pertahanan udara milik NATO yang dibangun sejak tahun 1967.¹³ Selain itu, Yunani juga merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah personel aktif terbanyak di dalam NATO dengan jumlah 180.000 unit, angka tersebut setara dengan jumlah personel aktif Jerman dan Italia.¹⁴

Dengan begitu, Yunani merupakan sebuah mata rantai yang penting bagi Uni Eropa. Apabila Yunani berakhir keluar dari Uni Eropa, maka kerugian yang akan dialami oleh Uni Eropa tidak terbatas pada kerugian secara ekonomi saja namun juga

¹³ NAMFI Official Website (online) <http://www.namfi.gr/> diakses pada 2 November 2016

¹⁴ "Financial and Economic Data Relating to NATO Defence" (PDF). NATO. NATO. Diakses pada 2 November 2016

kerugian di aspek militer dan geopolitik. Terlebih lagi, arah politik luar negeri Yunani yang semakin mendekat kepada negara-negara komunis seperti Russia dan China menjadi ancaman tersendiri untuk NATO. Menteri Pertahanan Yunani dibawah kepemimpinan Alexis Tsipras, Panos Kammenos, secara eksplisit menyampaikan bahwa apabila Yunani gagal dalam re-negosiasi dana talangan dengan Uni Eropa, maka Yunani harus menggunakan rencana B, rencana B tersebut adalah dengan mencari sumber dana lain seperti Amerika Serikat, Russia, atau China.¹⁵ Untuk alasan itulah mengapa pemerintah Yunani dibawah kepemimpinan Alexis Tsipras berani menentang tekanan yang terus diberikan oleh Uni Eropa dan dengan begitu meningkatkan *bargaining position* Yunani dalam re-negosiasi persyaratan dana talangan dengan Uni Eropa.

C. Mendapatkan Legitimasi Pemerintahan dari Rakyat Yunani

Semenjak masa krisis pada tahun 2009, setiap Perdana Menteri yang menjabat di Yunani selalu dihadapkan dengan problematika yang sama, yakni menemukan solusi untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Yunani hingga saat ini. Disamping hal itu, setiap pemimpin Yunani dituntut untuk dapat bekerja dengan baik dibawah tekanan Uni Eropa. Uni Eropa tidak memberikan tekanan-tekanan tersebut tanpa alasan. Yunani merupakan satu negara yang bekerja dalam sebuah sistem perekonomian yang terintegrasi sehingga apabila terjadi sebuah krisis akan berdampak pada keseluruhan sistem tersebut. Dengan kata lain, Uni Eropa berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dengan cara mengatasi krisis yang terjadi di Yunani.

¹⁵ CNN Indonesia, Yunani Mainkan Kartu Geopolitik Terkait Hutang Uni Eropa (Online) <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150217125937-134-32747/yunani-mainkan-kartu-geopolitik-terkait-hutang-uni-eropa/> diakses pada 2 November 2016

Namun, pemimpin-pemimpin yang menjabat sebagai Perdana Menteri Yunani sebelum masa Alexis Tsipras selalu melakukan langkah kebijakan monoton dengan pola yang sama selama lima tahun terhitung dari 2009, yakni penghematan anggaran belanja dalam negeri yang terfokus kepada pemotongan gaji pegawai, pemotongan dana pensiun, restrukturisasi pajak, dan pemotongan hubungan kerja besar-besaran. Kebijakan yang dinilai sangat memberatkan rakyat tersebut pada kenyataannya bukanlah inisiatif dari pihak pemerintah Yunani melainkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Yunani agar dapat menerima *bailout* yang ditawarkan oleh Uni Eropa untuk membantu mengatasi defisit anggaran yang diakibatkan oleh penumpukan hutang luar negeri Yunani.

Dana talangan yang diberikan oleh Uni Eropa memang memiliki keuntungan tersendiri bagi Yunani dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, bantuan dana yang disertai oleh persyaratan-persyaratan yang memberatkan rakyat tersebut menimbulkan permasalahan sendiri bagi keberlangsungan ekonomi Yunani. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta banyaknya perusahaan yang bangkrut menyebabkan jumlah lapangan kerja menjadi sangat minim. Dalam menanggapi tekanan-tekanan tersebut, pemerintah Yunani sebelum masa PM Alexis Tsipras nampak seperti mengambil keputusan secara satu pihak tanpa adanya persetujuan rakyat. Hal tersebut sangat disayangkan oleh rakyat Yunani mengingat Yunani merupakan tempat lahirnya demokrasi.

Langkah pemerintah Yunani pada masa George Papandreou hingga Antonis Samaras untuk menyetujui begitu saja persyaratan yang ditawarkan oleh Uni Eropa menimbulkan menurunnya citra pemerintah di mata rakyat Yunani. Bagi rakyat Yunani, Perdana Menteri yang menjabat di Yunani seperti sebuah boneka yang

dikendalikan oleh Uni Eropa. Hal tersebutlah yang berusaha dihindari oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras pada masa kepemimpinannya sejak awal 2015 yang lalu.

Pada masa kampanye sebelum dirinya terpilih sebagai Perdana Menteri, Alexis Tsipras dengan lantang menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya tidak akan ada lagi pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja besar-besaran seperti yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan pada saat pidato perdananya sebagai perdana menteri, Alexis Tsipras juga dengan berani menyatakan bahwa kebijakan yang dipaksakan oleh Uni Eropa merupakan sebuah krisis humanitarian karena menyebabkan rakyat Yunani semakin sengsara. Janji-janji kampanye Tsipras untuk tidak melakukan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja benar-benar ditepatinya selama menjabat sebagai perdana menteri hingga saat-saat terakhir masa perundingan persyaratan *bailout*.

Langkah paling efektif yang dilakukan oleh Alexis Tsipras sebagai perdana menteri adalah dengan menggelar referendum untuk menentukan apakah Yunani akan menerima persyaratan dana talangan atau tidak. Sejatinya, referendum tersebut adalah langkah politis untuk menunjukkan bahwa PM Alexis Tsipras memihak masyarakat Yunani dan menyatakan bahwa dirinya memiliki kesamaan visi dengan rakyat Yunani.

Pada dasarnya, Alexis Tsipras mengetahui bahwa kebijakan penghematan memang merupakan suatu hal mutlak yang dibutuhkan oleh Yunani agar dapat mengantisipasi krisis yang selama ini melanda Yunani. PM Alexis Tsipras hanya mengulur waktu hingga batas terakhir perundingan dimana pada akhirnya dirinya tetap menyetujui persyaratan *bailout* ketiga oleh Uni Eropa dan berhasil menggiring

opini publik bahwa dirinya menyetujui persyaratan-persyaratan tersebut atas dasar keterpaksaan.¹⁶

Upaya Alexis Tsipras untuk meningkatkan citra pemerintahan Yunani yang satu visi dengan rakyatnya terbukti ketika dirinya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri setelah menyatakan *resign* hanya berselang dua bulan dari pencairan dana talangan oleh Uni Eropa. Pada saat itu, dirinya menyatakan mengundurkan diri karena alasan pemberontakan yang dilakukan oleh internal partainya, yaitu Syriza, dan juga langkah pengunduran diri tersebut diambil oleh Tsipras karena dirinya merasa bersalah telah membuat Yunani kembali harus menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat akibat kekalahannya dalam meja negosiasi dengan petinggi Uni Eropa. Legitimasi yang didapatkan oleh Alexis Tsipras begitu tinggi, hingga mencapai 61% berdasarkan polling yang dilakukan oleh Kapa Research. Dan menurut data survey yang dilakukan oleh Palmos Analysis, apabila pemilu diadakan kembali pada saat ini, maka Alexis Tsipras akan memenangkan 42,5% suara.¹⁷

Berbagai analis menyatakan bahwa legitimasi yang didapatkan oleh Alexis Tsipras berasal dari kiprahnya selama masa pemerintahannya pada periode pertama. Kegigihan Tsipras untuk menjalani negosiasi persyaratan dana talangan selama lima bulan telah membuatnya memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Yunani. Meskipun pada akhirnya Alexis Tsipras menuai kekalahan dalam upayanya untuk melakukan negosiasi kepada Uni Eropa yang memaksa Yunani untuk kembali menerima syarat

¹⁶ Business Week, "Greek Bailout Talks Could Take Three Weeks, Bond Payment Looms" (Online) <http://www.businessweek.com/news/2010-04-20/greek-bailout-talks-could-take-three-weeks-bond-payment-looms.html> diakses pada 8 November 2016

¹⁷ Huffington Post. The Mystery of Alexis Tsipras Popularity. http://www.huffingtonpost.com/entry/alexis-tsipras-popularity_us_55b00772e4b07af29d576d0c diakses pada 1 Desember 2016

dana talangan yang berupa kebijakan penghematan, namun dirinya merupakan satu-satunya pemimpin Yunani yang memberikan perlawanan terhadap pihak Uni Eropa.

Pemerintahan sebelumnya selalu menuruti persyaratan tersebut tanpa melalui dinamika yang sama seperti Alexis Tsipras. Sehingga pada saat Alexis Tsipras kalah dalam negosiasi, dirinya memiliki kredibilitas untuk menyatakan bahwa Yunani tidak memiliki jalan lain selain harus menerima persyaratan dana talangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa tersebut. Oleh karena itu, pada saat Tsipras menyatakan mengundurkan diri sebagai perdana menteri yang hanya berselang dua bulan semenjak penerimaan bailout, dirinya kembali terpilih sebagai perdana menteri. Hal tersebut terjadi karena dirinya berhasil meyakinkan rakyat Yunani bahwa dia telah menebus kesalahannya karena gagal dalam upaya negosiasi dengan pihak Uni Eropa dengan cara mengundurkan diri, dan di sisi lain Tsipras telah menunjukkan bahwa dirinya lah satu-satunya pemimpin yang memiliki kredibilitas tertinggi untuk memimpin Yunani di masa mendatang.

